



# Buletin Parlementaria

Nomor 1123/IV/IX/2020 • September 2020

## DPR Apresiasi Jawa Tengah Tekan Penyebaran Covid-19



3 Raih WTP 10 Kali,  
Konsistensi DPR Jaga  
Kepercayaan Rakyat



7 Bendung PHK,  
Stimulus Ekonomi Harus  
Segera Disalurkan



9 772614 339005

# DPR Apresiasi Jawa Tengah Tekan Penyebaran Covid-19

**W**akil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir mengapresiasi langkah Gubernur

Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo dalam menekan angka penularan dan penyebaran virus Covid-19. Menurut Adies, seluruh jajaran birokrasi baik Gubernur, Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) serta seluruh komunitas bersatu dalam upaya penanganan serta pencegahan pandemi Covid-19.

Hal itu disampaikan Adies kepada awak media usai bersama Gubernur Jateng memimpin pembagian 36 ribu masker kepada komunitas masyarakat Jateng, di sela-sela Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI, di Markas

Kepolisian Daerah (Mapolda) Provinsi Jateng, Semarang, Jumat (18/9). Hadir dalam acara selaku tuan rumah Kapolda Jateng Irjen Pol. Ahmad Luthfi.

“Ini langkah bagus, semuanya dilibatkan, termasuk komunitas. Semua harus turun untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak menganggap remeh virus ini. Terlebih dalam situasi saat ini semua masyarakat harus semakin disiplin menerapkan protokol kesehatan dimanapun dan kapanpun,” ujar Adies.

Tak hanya itu, politisi Fraksi Partai Golkar itu juga berharap penegakan hukum bagi pelanggar protokol kesehatan terus digalakkan. Adies mengusulkan, agar adanya peraturan khusus yang mengatur terkait sanksi yang memberikan efek jera bagi

pelanggar protokol kesehatan Covid-19.

“Regulasi di tingkat kelurahan, camat, provinsi harus sama, sehingga tidak membingungkan masyarakat. Tempat penegakkan aturan itu juga harus diperhatikan, jangan sampai jadi klaster baru pandemi Covid-19,” tandas legislator dapil Jawa Timur I itu.

Sementara itu, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menekankan adaptasi kebiasaan baru tidaklah sulit. Masyarakat harus membiasakan ‘3M’. Adapun yang dimaksud ‘3M’ yaitu menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun.

“Saya ingin sampaikan, bagi masyarakat yang punya riwayat gula darah tinggi dan hipertensi, harus banyak di rumah. Dua penyakit ini angka kematiannya tinggi,” tegas Ganjar. ■ pun/sf



Wakil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir dan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo memimpin pembagian masker di Mapolda Jateng. Foto: Puntho/MAN



# Raih WTP 10 Kali, Konsistensi DPR Jaga Kepercayaan Rakyat



Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani. Foto: Geraldi/MAN

**K**etua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani memastikan DPR RI konsisten menjalankan prinsip tata kelola keuangan yang profesional, transparan, dan akuntabel. Pernyataan Puan disampaikan sejalan dengan penghargaan dari Kementerian Keuangan, karena DPR RI 10 kali berturut-turut meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan yang diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Penghargaan Kemenkeu itu disampaikan dalam Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2020, yang mengambil tema Tantangan Keuangan Negara dalam Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang diselenggarakan secara daring, Selasa (22/9). “Sesuai prinsip, kami ingin DPR modern dan akuntabel. Salah satu bentuknya adalah pengelolaan keuangan yang mendapat penilaian WTP,” ujar Puan.

“Kami di DPR selalu berusaha meningkatkan kinerja, menjalankan tugas dengan baik dan sesuai aturan, menyerap aspirasi rakyat, pada masa

sidang maupun saat reses,” komitmen Puan lebih lanjut.

Politisi PDI-Perjuangan itu mengatakan, penghargaan dari Kemenkeu karena 10 kali berturut-turut meraih WTP menjadi penambah semangat DPR RI untuk meningkatkan kinerja dengan tata kelola keuangan yang akuntabel dan memberi manfaat besar pada kepentingan rakyat.

Dengan diraihnya penghargaan tersebut, Puan yakin DPR RI periode 2019-2024 bisa menjadi lembaga legislatif yang modern dan mampu melalui tantangan kemajuan zaman. “Kami ingin DPR mewujudkan harapan publik, menjaga kepercayaan rakyat, terbuka, dan menghasilkan keputusan terbaik untuk rakyat Indonesia,” ujar legislator dapil Jawa Tengah V itu.

Dalam Rakernas tersebut, Menkeu Sri Mulyani menyampaikan apresiasinya pada kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah yang 10 kali berturut-turut mendapat opini WTP. Capaian itu adalah bentuk konsistensi pada tata kelola keuangan yang akuntabel dan menjadi catatan sejarah luar biasa,” jelas Sri Mulyani. ■ sf



**PENGAWAS UMUM**  
Pimpinan DPR RI

**KETUA PENGARAH**

Ir. Indra Iskandar, M.Si (Sekretaris Jenderal DPR RI)

**WAKIL KETUA PENGARAH**

Dra. Damayanti, M.Si (Deputi Bidang Persidangan)

**PIMPINAN PELAKSANA**

Y.O.I Tahapari, S.H, M.Si (Karo Pemberitaan Parlemen)

**PIMPINAN REDAKSI**

Drs. Mohammad Djazuli, M.Si (Kabag Media Cetak)

**W.K PIMPINAN REDAKSI**

Sugeng Irianto, S.Sos., M.A. (Kasubag Media Cetak)

Suciati, S.Sos. (Kasubag Media Analisis)

Nita Juwita, S.Sos. (Kasubag MedSos dan Website)

**REDAKTUR**

Erman Suhendri, S.Sos.I, Sofyan Efendi

**REDAKTUR FOTO**

M. Andri Nurdiansyah

**SEKRETARIS REDAKSI**

Guntur Dewanto, Hasri Mentari

**ANGGOTA REDAKSI**

Rizka Arinindy, S.Sos, Erlangga Panji Samudro, S.Ikom, Alfi Widoretno, S.I.Kom, Natasya Amanda P, S.Kom, Rahayu Setyowati, Muhammad Husen, Virgianne Meiske Patuli, Ria Nur Mega, Devi Irandi, Hendra Sunandar, Surahmat Eko Budi Setianto, Taufan Syahrulli, Pumtho Pranowo, Singgih Kinanti Rimbani, Siti Nadiah, Riyan Hidayat, Nafisa Hanum Alaydrus, Larissa Amanda Indianti, Mohammad Rizki Nugraha.

**FOTOGRAFER**

Naefuroji, Jaka Nugraha, Runi Sari Budiati, Arief Rachman, R. Kresno PD, Moerpoeni, Azka Restu Afdhillah, Geraldi Opie.

**ANALIS MEDIA**

Deprisa Citra Akbari, Sunarya, Fahmi Harfa, Safitri Restu Widoywati

**INFOGRAFIS**

Tiara Annisa, Chasbi Chusna Mulia, Dipa Nattallo, Fajar Suryanto

**ADMINISTRASI**

Suhendi, Lutfi Suci Nur'aini, Damar Maulana Taher

**PENERBITAN**

**PIMPINAN PENERBITAN**

Djoko Hanggoro, S.T. (Kabag Penerbitan)

**PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI**

Mediantoro, S.E. (Kasubag Produksi)

**STAF PRODUKSI**

Subadri, S.E, Barliansyah, Fathurahman

**DESAIN GRAFIS**

Dito Sugito

**FOTOGRAFER ART**

Friederick Munchen

**PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI**

Eko Priyanto, S.E. (Kasubag Distribusi)

**KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI**

Siti Nur Aidah S.A.P., M.AP, Isfandi Mulyana, Yudi Kresna

**ADMINISTRASI**

**STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI**

Arif, Lamin, Yuliana Puspita

Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421

Email : bag\_penerbitan@dpr.go.id

**ISI BERITA DAN MATERI FOTO  
DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN  
HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN HASIL  
CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)**

# DPR Dorong Peningkatan Kerja Sama Indonesia-Perancis



Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin saat menerima Dubes Perancis untuk Indonesia H.E Olivier Chambar di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta. Foto: Runi/MAN

**W**akil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) M. Azis Syamsuddin mendorong peningkatan kerja sama di berbagai sektor antara Indonesia dengan Perancis. Mengingat kedua negara ini sudah memiliki sejarah kerja sama yang sudah baik dan ke depannya perlu ditingkatkan dalam hal kerja sama di berbagai bidang, seperti bidang ekonomi, lingkungan, perubahan iklim dan pertahanan.

“Banyak kerja sama di bidang pertahanan, maritim dan banyak sektor lain. Dalam hal ini Menteri Pertahanan juga sudah berkunjung ke Perancis, kemudian Pak Presiden juga telah melakukan hubungan yang baik. Selain itu juga berkenaan dengan *blueprint* dalam rangka untuk

perubahan iklim dan lingkungan,” ujar Azis saat menerima audiensi Duta besar Perancis untuk Indonesia H.E Olivier Chambar di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta pada Rabu (23/9).

Politisi Partai Golkar ini pun juga mengakui bahwa Perancis telah menjadi mitra Indonesia dalam menjaga komitmennya di bidang maritim sebagaimana tertuang dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS 1982). Sehingga sejarah kerja sama yang baik ini harus lebih ditingkatkan lagi ke depannya.

“Kita bisa meningkatkan secara gradual kerja sama, khususnya dalam hal yang berpegang pada UNCLOS 1982 yang merupakan bagian daripada komitmen Indonesia untuk menjaga maritim, baik dari sisi pertahanan kemudian ekonomi. Kami menyambut

baik kerja sama pemerintah Indonesia dan Perancis yang terus bisa ditingkatkan dari waktu ke waktu,” sambung Azis.

Sikap saling *support* antara Indonesia dan Perancis pun dinilai akan menguntungkan kedua negara. Mengingat Perancis adalah bagian dari Uni Eropa yang bisa menjadi medium komunikasi antara Indonesia dengan negara kawasan Eropa lainnya.

Dalam kesempatan ini, Duta Besar Perancis untuk Indonesia, H.E. Olivier Chambar mengucapkan terima kasih atas telah diterimanya oleh Pimpinan DPR RI.

Namun secara spesifik, ia pun akan terus mendukung langkah-langkah peningkatan kerja sama dengan Indonesia yang merupakan negara dengan penduduk terbesar dan memiliki kekayaan alam yang melimpah. ■ hs/es

# Pertumbuhan Ekonomi Negatif, Pemerintah Harus Buat Kebijakan Strategis

**P**emerintah merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi pada kuartal III - 2020. Diproyeksikan, pertumbuhan ekonomi kuartal III dan IV juga akan negatif. Merespon hal itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad meminta Pemerintah membuat kebijakan strategis yang berdampak, dan bisa langsung dinikmati masyarakat.

“Kami minta ke Pemerintah untuk membuat kebijakan-kebijakan strategis yang dinikmati dan berhubungan dengan masyarakat, sehingga bisa menggerakkan kembali roda ekonomi,” kata Dasco kepada awak media di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Rabu (23/9).

Politisi Fraksi Partai Gerindra itu juga meminta kepada Pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan strategis dan solutif bagi pekerja yang terdampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Ia optimis dengan kerja sama dan koordinasi yang baik antar kementerian, krisis ekonomi dapat dilalui.

“Kami optimis dengan kerja sama yang baik antara Pemerintah dan semua komponen, mudah-mudahan krisis ekonomi ini dapat kita lalui bersama,” yakin legislator daerah pemilihan (dapil) Banten III yang juga Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan (Korekku) DPR RI itu.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri

Mulyani Indrawati merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi pada kuartal III tahun 2020. Pertumbuhan ekonomi kuartal III dan IV diperkirakan negatif. Ia mengatakan, pada kuartal ketiga, perekonomian Indonesia kemungkinan akan mengalami kontraksi minus 2,9 persen hingga minus 1,1 persen.

Sementara, pada kuartal II pertumbuhan ekonomi Indonesia sudah mengalami minus 5,32 persen. Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi akhir tahun diperkirakan berada pada kisaran minus 1,7 persen hingga minus 0,6 persen. Dengan kondisi ini, tidak menutup untuk terjadinya resesi ekonomi di Indonesia. ■ ann/sf



Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memberikan keterangan kepada awak media di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta. Foto: Yoga/MAN

# Transportasi Berbasis Rel Harus Diprioritaskan Pemerintah



Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel saat Kunjungan Kerja ke Kantor Pusat PT. KAI di Bandung, Jawa Barat. Foto: Rilky/MAN

**W**akil Ketua DPR RI Rachmat Gobel mengusulkan pembangunan transportasi berbasis rel harus sebagai agenda prioritas Presiden Joko Widodo dan jajaran kementerian terkait dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Mengingat begitu signifikan, vital dan strategisnya jasa transportasi berbasis rel.

Gobel meyakini, hal itu sangat mungkin dilakukan. Terlebih, program kerja Presiden Joko Widodo selama ini yang menugaskan Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam pembangunan infrastruktur transportasi berbasis rel yang masif.

“Namun demikian, PT. Kereta Api

Indonesia (KAI) sendiri harus bisa menjalankan bisnis dengan konsep menunjang efisiensi dan peningkatan ekonomi. Serta pembangunan negara maupun pertumbuhan ekonomi yang tinggi,” imbuh Gobel saat kunjungan kerja ke Kantor Pusat PT. KAI, di Bandung, Jawa Barat, Sabtu (19/9).

Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang) ini mengimbau PT. KAI harus terus berkomitmen menjadi ladang lapangan kerja yang produktif bagi sumber daya manusia Indonesia. Yakni, dengan membuka peluang bisnis kemitraan bagi ekonomi skala kecil dan menengah dalam sektor jasa dan barang tertentu.

Tak hanya itu, Gobel juga meminta PT. KAI mengedepankan kebijakan perbaikan dan perubahan wajah

perkeretapian nasional dalam lima tahun ke depan menjadi lebih modern. Mengingat, masih kata Gobel, sejarah transportasi berbasis rel ini sudah hadir di wilayah Indonesia sejak zaman Kolonial Hindia Belanda.

“PT. KAI harus mengembangkan transportasi massal, meremajakan dan menghidupkan kembali jaringan kereta di sejumlah wilayah secara terintegrasi, berimbang, aman, nyaman, merata, dan efisien,” tegas politisi Partai NasDem ini.

Sementara itu, Direktur Utama PT. KAI Didiek Hartantyo mengapresiasi DPR RI yang mendukung pencairan dana Penyertaan Modal Negara (PMN) serta menjadikan transportasi berbasis rel sebagai prioritas. Tujuannya, demi menjadikan Indonesia menjadi negara kompetitif dalam lingkup perkembangan ekonomi global. ■ pun/es

# Bendung PHK, Stimulus Ekonomi Harus Segera Disalurkan

**P**emberlakuan kembali Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di wilayah DKI Jakarta hampir dipastikan berdampak pada ketidakmampuan masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi. Menanggapi persoalan tersebut Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar beranggapan, Pemerintah harus terus diingatkan untuk segera menyalurkan stimulus ekonomi guna membendung gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Tak ada jalan lain selain seluruh komponen bangsa harus bersinergi untuk membendung gelombang PHK agar dampak sosial lebih luas bisa dicegah. "Pemerintah harus terus diingatkan bahwa berbagai stimulus harus segera dan cepat disalurkan. Berbagai hambatan birokrasi harus dipangkas. Permudah mekanisme pencairan," paparnya dalam siaran pers yang diterima **Parlementaria**, Selasa (22/9).

Gus Ami, sapaan akrabnya, menyadari, pandemi Covid-19 tentu saja akan berpengaruh terhadap aspek sosial lainnya. Yang paling terdampak adalah kelompok ekonomi bawah yang membutuhkan mobilitas dan interaksi sosial dengan tatap muka. Dunia usaha yang mulai bergeliat pun kembali terhenti. Respon masyarakat pun beragam menyikapi soal ini. Ada yang menolak, ada yang memahami.

Tetapi satu hal, Pemerintah dalam hal ini sungguh ingin mengedepankan keselamatan rakyatnya. Pemerintah dan DPR pun berjibaku dalam melahirkan kebijakan-kebijakan yang dapat meminimalisir dampak pandemi, terutama terkait soal ekonomi.

"Sungguh pilihan yang sulit, satu sisi Pemerintah ingin menyelamatkan

jiwa rakyatnya, tapi di sisi lain Pemerintah juga harus memastikan bahwa ekonomi harus tetap bergerak agar kita terhindar masuk jurang resesi," cemas Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) itu.

Menurutnya, Pemerintah dan DPR RI paham betul, gelombang PHK tak bisa dihindari. Survei SMRC terbaru menyebut ada sekitar 29 juta warga masyarakat yang terkena PHK akibat Covid 19. KADIN juga mencatat, di sektor formal ada sekitar 6,4 juta orang yang terkena PHK. 64 juta UMKM yang selama ini menjadi salah satu penyangga ketenagakerjaan pun terkena imbasnya. UMKM yang berhenti beroperasi karena Covid sampai saat ini mencapai 48,4 persen dari total keseluruhan.

Lebih lanjut Gus Ami mengatakan bahwa berbagai skema-skema perlindungan sosial sesungguhnya telah diberikan negara. Hal ini telah menjadi komitmen bersama antara DPR RI dan pemerintah. Mulai soal stimulus untuk dunia usaha, stimulus untuk UMKM, pekerja bergaji rendah, bantuan untuk orang miskin, BLT Dana Desa, dan lain sebagainya.

Dia menegaskan, yang diperlukan sekarang adalah sinergi semua komponen agar bergerak bersama menahan laju dan gelombang PHK agar tidak semakin membesar. "Perlu sinergi pemerintah pusat dan daerah agar data yang diberikan bisa akurat sehingga bantuan tepat sasaran," tegas Gus Ami, yang juga merupakan Ketua Pengawas Penanganan Covid-19. ■ eko/es



Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar. Foto: Gerald/IAN

# Komisi I Setujui Pagu Definitif 2021 Mitra Kerja

Rapat Komisi I DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto menyetujui pagu alokasi anggaran RAPBN 2021 sejumlah mitra kerjanya, antara lain Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN), Badan Keamanan Laut (Bakamla) dan Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas).

“Komisi I DPR RI menyetujui pagu definitif Lemhannas sebesar Rp 182 miliar yang dialokasikan untuk program dukungan manajemen sebesar Rp 141 miliar dan program pembinaan ketahanan nasional Rp 40,5 miliar,” kata Utut saat membacakan kesimpulan

rapat di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (21/9).

Adapun, masih kata politisi PDI-Perjuangan itu, pagu definitif BSNN disepakati sebesar Rp 1,71 triliun. Masing-masing dialokasikan untuk program Dukungan Manajemen BSSN Rp 753 miliar dan program Ketahanan Siber dan Sandi Rp 963 miliar.

Kemudian, Komisi I DPR RI juga menyetujui pagu alokasi anggaran Bakamla sebesar Rp 515 miliar yang dialokasikan untuk Program Dukungan Manajemen sebesar Rp 256 miliar dan Program Keamanan dan Keselamatan di Wilayah Perairan dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia Rp 259 miliar.

Utut melanjutkan, Komisi I DPR RI juga menyetujui pagu alokasi anggaran RAPBN TA 2021

Wantannas sebesar Rp 50,4 miliar yang dialokasikan untuk Program Dukungan Manajemen sebesar Rp 42 miliar dan Program Kebijakan dan Strategi Ketahanan Nasional Rp 7,9 miliar.

“Selanjutnya, Komisi I DPR RI akan menyampaikan kesimpulan rapat kepada Badan Anggaran DPR RI untuk disetujui dalam Rapat Paripurna DPR RI mendatang,” tandas Utut. Hadir dalam rapat ini, Gubernur Lemhannas, Kepala BSSN, Kepala Bakamla, Sekretaris Jenderal (Sesjen) Wantannas. ■ ann/sf

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto. Foto: Eot/AMAN

”

**MENYETUJUI  
PAGU DEFINITIF  
LEMHANNAS SEBESAR  
RP 182 MILIAR YANG  
DIALOKASIKAN UNTUK  
PROGRAM DUKUNGAN  
MANAJEMEN SEBESAR  
RP 141 MILIAR DAN  
PROGRAM PEMBINAAN  
KETAHANAN NASIONAL  
RP 40,5 MILIAR**





# Pilkada Serentak Tetap 9 Desember 2020



Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung. Foto: Runi/MAN

**M**encermati seluruh tahapan yang sudah dan sedang berlangsung masih sesuai sebagaimana yang telah direncanakan dan situasi yang masih terkendali, maka Komisi II DPR RI bersama Menteri Dalam Negeri, Ketua KPU RI, Ketua Bawaslu RI dan Ketua DKPP RI menyepakati pelaksanaan Pilkada serentak 2020 tetap dilangsungkan pada tanggal 9 Desember 2020, dengan penegakan disiplin dan sanksi hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan Covid-19.

Hal tersebut diungkapkan Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung dalam kesimpulan Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri, Ketua KPU RI, Ketua Bawaslu RI dan Ketua DKPP RI, di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (21/9).

“Dalam rangka mengantisipasi penyebaran Covid-19 dan terjadinya pelanggaran protokol kesehatan Covid 19, Komisi II DPR RI meminta KPU RI untuk segera merevisi PKPU Nomor 10 tahun 2020 tentang perubahan atas PKPU Nomor 6 tahun 2020 tentang pelaksanaan Pilkada dalam kondisi bencana non alam,” ucap politisi Fraksi Partai Golkar itu

Khususnya ditekankan pada pengaturan, untuk melarang pertemuan yang melibatkan massa banyak dan atau kerumunan seperti rapat umum, konser, arak-arakan, dan lain-lain. Selain itu, juga untuk mendorong terjadinya kampanye melalui media daring. Juga mewajibkan penggunaan masker, *hand sanitizer*, sabun, dan alat pelindung kesehatan lainnya sebagai media kampanye.

Penegakan disiplin dan sanksi hukum yang tegas sesuai dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Di samping itu juga untuk pengaturan tata cara pemungutan suara, khususnya untuk pemilih yang berusia rentan terhadap Covid-19. Serta, untuk pengaturan rekapitulasi hasil pemungutan suara melalui e-rekap.

“Berdasarkan penjelasan Menteri Dalam Negeri, KPU, Bawaslu dan DKPP tentang rumusan dan langkah-langkah penegakan disiplin dan sanksi hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan Covid-19 selama tahapan penyelenggaraan Pilkada 2020, Komisi II DPR RI meminta agar kelompok kerja yang telah dibentuk bersama antara Bawaslu, KPU, DKPP, Kemendagri, TNI, Satuan Tugas Covid-19, Kejaksaan dan Kepolisian diintensifkan terutama dalam tahapan yang berpotensi terjadinya pelanggaran,” paparnya.

Adapun tahapan yang berpotensi pelanggaran yang dimaksud itu antara lain adalah tahapan penetapan pasangan calon, tahapan penyelesaian sengketa calon, tahapan pengundian nomor urut, tahapan kampanye, tahapan pemungutan dan penghitungan suara, serta tahapan penyelesaian sengketa hasil.

“Melalui Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi, Komisi II DPR RI, Mendagri, KPU, Bawaslu, dan DKPP bersepakat untuk meminta penjelasan secara rinci, terukur dan berkelanjutan kepada Satgas Penanganan Covid-19 tentang status zona dan resiko Covid-19 pada setiap daerah yang menyelenggarakan Pilkada untuk mengantisipasi munculnya klaster baru Covid-19,” pungkasnya. ■ dep/es

# Kaburnya Napi WNA China Perlu Diinvestigasi Mendalam

**A**nggota Komisi III DPR RI Marinus Gea mendorong adanya investigasi secara mendalam terkait kaburnya narapidana (napi) Warga Negara Asing (WNA) asal China, bernama Cai Changpan dari Lapas Kelas I Tangerang, Banten. Dengan dilakukannya investigasi, nantinya diharapkan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dan kecurigaan dari semua pihak yang mempertanyakan atas persoalan tersebut.

“Apa mungkin napi ini melarikan diri menggali lubang dengan sendiri tanpa bantuan orang lain. Apa saja yang diinvestigasi? Kemana tanah bekas galian tersebut dibuang, berapa lama dia mengerjakan. Lalu selain teman satu tahanan yang menurut laporan tadi mengaku membantu penggalian, apakah ada oknum lain yang terlibat. Ini harus diyakinkan dan perlu diinvestigasi secara mendalam, sehingga pertanyaan-pertanyaan tadi bisa terjawab,” jelas Marinus usai mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI ke Lapas Kelas I Tangerang, Provinsi Banten Rabu (23/9).

Terkait persoalan tersebut politisi dapil Banten III ini menilai harus ada perbaikan terus-menerus pada sistem pengawasan terhadap napi, terutama kepada napi-napi khusus yang harus sangat ekstra untuk dilakukan pengawasan. Menurutnya, proses mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh internal di dalam Lapas serta pengecekan para napi perlu menjadi perhatian.

“Napi yang kabur ini kan napi dengan pidana hukuman mati, oleh karena itu perlu adanya sistem pengawasan yang ekstra sehingga



Anggota Komisi III DPR RI Marinus Gea saat Kunspek Komisi III DPR RI ke Lapas Kelas I Tangerang. Foto: Tiera/MAN

tidak terjadi kelalaian dari para petugas. Tentu, hal ini menjadi sebuah pembelajaran untuk terus dilakukan perbaikan-perbaikan implementasi sistem dan evaluasi baik dari internal maupun diri secara bersama-sama,” ungkap Marinus.

Senada dengan Marinus, Anggota Komisi III DPR RI Moh. Rano Al Fath menemukan sejumlah hal-hal menarik yang menurutnya tidak masuk akal. “Yang pertama dilihat proses menggali dari kamar tahanan sampai posisi tempat dia keluar, bagaimana napi tersebut bisa tahu posisi dia keluar, padahal kan dia bukan warga asli sini. Nah, ini berarti kan ada indikasi bahwa adanya kerja sama dengan pihak luar atau di dalam Lapas,” jelas Rano.

Lebih lanjut Rano mengatakan, dengan menggali lubang bawah tanah hingga lolos tentu

membutuhkan oksigen. Dirinya berpendapat, mustahil bagi manusia untuk bisa bertahan nafas di kedalaman 20 sampai 30 meter di bawah tanah bahkan bekas galian tanahnya pun tidak ditemukan. “Menarik lagi setelah didalami bahwa petugas Lapas yang menjaga menara saat itu tertidur, dan napinya terindikasi punya *handphone*. Nah ini kan sudah termasuk adanya kelalaian oleh petugas Lapas,” sesalnya.

Oleh sebab itu, politisi PKB ini memandang sistem yang saat ini berjalan di Lapas Kelas I Tangerang harus diperbaiki. Terutama, sistem keamanan dan pengawasan. Adanya persoalan ini, menurutnya menjadi suatu tamparan bagi Kemenkumham dan berharap ke depan hal yang sama tidak terulang kembali. ■ **tra/es**



Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae (tiga dari kiri) saat memimpin Tim Kunspek Komisi V DPR RI meninjau Bendungan Sindang Heula, Serang, Banten. Foto: Runi/MAN

# Komisi V Apresiasi Progres Bendungan Sindang Heula

**W**akil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae bersama Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI mengapresiasi kinerja dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) atas selesainya progres pembangunan Bendungan Sindang Heula, di Kabupaten Serang, Provinsi Banten.

Ridwan menilai, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono sangat jeli melihat kebutuhan masyarakat Kabupaten Serang. Dengan adanya pembangunan bendungan ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan irigasi ke sekitar 1.000 hektar sawah, mereduksi banjir hingga 50.000 meter kubik per detik, serta untuk penyediaan air baku.

“Untuk itu, saya minta (bendungan) ini dapat terpelihara dengan baik.

Mengapa kita harus jaga, karena dengan adanya bendungan tersebut bisa mencegah adanya banjir 50 tahunan atau 100 tahunan, serta bermanfaat luas bagi masyarakat yang ada, terutama di wilayah Banten atau Serang,” kata Ridwan di sela memimpin Tim Kunspek meninjau Bendungan Sindang Heula, Serang, Banten, Kamis (17/9).

Dalam kesempatan itu, Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy menjelaskan, dengan dibangunnya Bendungan Sindang Heula ini, ia berharap ke depan Pemerintah Daerah dapat melayani suplai air bersih ke wilayah Cidanau, Ciujung, dan Cidurian. Kemudian mengelola Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) terhadap wilayah Kabupaten Serang, Kota Cilegon dan Kota Serang agar bisa memenuhi kebutuhan air bersih untuk warga yang membutuhkan.

“Selain itu saya berterima kasih atas kehadiran Komisi V ke Provinsi Banten, yang tentunya kehadiran Anggota Komisi V diharapkan dapat mensinergikan program dan harapan terhadap aspirasi yang tadi kita perlukan. Dengan hadirnya Komisi V, tentunya bisa menjadi harapan kami pemerintah daerah dan masyarakat Banten agar dapat didorong program terkait pembangunan infrastruktur yang ada di Provinsi Banten,” harap Andika kepada Komisi V DPR RI.

Pembangunan bendungan ini menghabiskan waktu kurang lebih 3 tahun dengan anggaran Rp 460 miliar, sementara total panjang danau 250 meter, serta kedalaman 40 meter. Turut hadir, Wakil Bupati Serang Pandji Tirtayasa dan Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau, Ciujung dan Cidurian Saroni Soegiarto. ■ rni/sf

# Progres Pembangunan Tol Cisumdawu Perlu Dipercepat

**K**omisi V DPR RI meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) beserta jajaran terkait untuk segera menyelesaikan proses pembangunan Tol Cisumdawu (Cileunyi - Sumedang - Dawuan) yang menghubungkan Kota Bandung dengan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) di Kertajati, Majalengka, Jawa Barat. Proses pembangunan akses tersebut apabila dipercepat diyakini akan mampu mempercepat juga mobilitas yang ada di BJB.

“Pada prinsipnya, Komisi V memberikan dukungan penuh atas Bandara Internasional Jawa Barat di Kertajati ini agar dapat berfungsi secara optimal dan bisa memberikan manfaat bagi masyarakat di Jawa Barat,” ujar Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ke BIJB di Kertajati, Majalengka, Jawa Barat, Kamis (17/9).

Untuk optimalisasi BIJB tersebut, Komisi V DPR RI memberikan perhatian pada aksesibilitas bandara dengan mendesak percepatan jalan tol agar waktu tempuh 90 menit dari Bandung bisa dicapai. “Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah infrastruktur akses jalan dari dan menuju Bandung menuju Kertajati ini untuk dipercepat pembangunannya. Komisi V akan meminta pemerintah provinsi dan kabupaten serta pemerintah pusat untuk dapat segera menyelesaikan proses pembebasan lahannya dengan baik,” tegas Andi Iwan.

Politisi Partai Gerindra ini juga menyebut sejumlah wilayah yang akan dijadikan jalan tol ini berkaitan dengan wilayah hutan, sehingga perlu ada

koordinasi antara Kementerian PUPR dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). “Karena, ada beberapa wilayah yang berkaitan dengan perhutanan. Sehingga, kita akan melakukan koordinasi dengan Menteri LHK sehingga ada sinergi yang baik dan diselesaikan,” ujarnya.

Legislator dapil Sulawesi Selatan ini juga menyebut, kendala anggaran tidak menjadi persoalan dalam pembangunan tol Cisumdawu ini, karena pemerintah pusat sendiri telah mengintervensi pembebasan lahan ini melalui APBN, tinggal bagaimana pemerintah mampu mensosialisasikan pembebasan lahan ini dengan cara yang baik.

“Kalau masalah anggaran, pemerintah pusat sudah mengintervensi pembebasan lahan ini dengan APBN. Jadi itu sebenarnya tidak ada masalah, yang jadi persoalan adalah bagaimana mensosialisasikan masyarakat kita terkait permasalahan tersebut dan yang berkaitan dengan masalah hutan ini perlu dikonsultasikan,” tegasnya.

Untuk mewujudkan pembangunan tersebut memerlukan kerja sama yang baik antar kementerian. Dari sisi dukungan politik, Komisi V DPR RI akan mendukung percepatan pembangunan tol Cisumdawu yang menghubungkan BIJB dengan Kota Bandung tersebut. ■ hs/sf



Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras memimpin Tim Kunspek Komisi V DPR RI ke BIJB. Foto: Hendra/MAN

# Pembangunan Pasar Legi di Ponorogo Berlangsung Baik



Wakil Ketua Komisi V DPR RI Nurhayati saat memimpin Tim Kunspek Komisi V DPR RI meninjau pembangunan Pasar Legi, Ponorogo, Jawa Timur. Foto: Eno/MAN

**K**ementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sedang melaksanakan proyek pembangunan pasar tradisional modern terbesar di Indonesia yaitu Pasar Legi di Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur (Jatim). Proyek Pemerintah senilai Rp 133 miliar ini dilaksanakan oleh PT. Adi Persada Gedung, adapun progres pengerjaannya saat ini sudah mencapai 50 persen.

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Nurhayati menilai, progres pembangunan Pasar Legi berlangsung baik. Hal ini terlihat dari kualitas bangunan dan instalasi airnya sudah memenuhi syarat jika nantinya mulai

dioperasikan. “Ini rencananya akan jadi pasar tradisional modern terbesar di Indonesia. Pasar dengan empat lantai ini cukup fenomenal di Ponorogo,” ujar Nurhayati saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI meninjau pembangunan Pasar Legi, Ponorogo, Jawa Timur, Kamis (17/9).

Politisi Fraksi PPP ini berharap pasar tersebut bisa bermanfaat untuk masyarakat Ponorogo. Para pedagang yang terdampak oleh terbakarnya Pasar Songgolangit juga diharapkan bisa ditampung di Pasar Legi ini, mengingat satu lantainya bisa menampung sekitar 400 pedagang. “Semoga jika sudah jadi nantinya bisa menampung para pedagang, dan pesan kami dijaga kebersihannya,” ujar Nurhayati.

Sementara itu, Project Manager PT Adi Persada Gedung (PT. APG) Agung Dwi Mulyana menjelaskan pembangunan secara fisik rencananya akan selesai pada bulan Desember nanti. Namun, jika sudah selesai membutuhkan waktu dua bulan, yakni sekitar bulan Februari 2021 untuk bisa dioperasikan.

Agung menyebut, selama pembangunan Pasar Legi ini tidak menemui kendala yang berarti. Permasalahan dalam proyek pembangunan ada, tetapi secara teknis bisa diselesaikan. “Semoga pembangunan lancar sampai Desember, sehingga 100 persen selesai fisiknya tanpa kendala yang berarti,” pungkasnya. ■ eno/es



Ketua Komisi VI DPR RI Faisol Riza memimpin Rapat Kerja dengan para Menteri dan Kepala Lembaga di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta. Foto: Arief/MAN

# Komisi VI Setujui Anggaran Lima Mitra Kerja

**K**omisi VI DPR RI telah menyetujui pagu anggaran mitra kerjanya yakni Kementerian BUMN, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi dan UKM, serta BKPM. Persetujuan tersebut dinyatakan oleh Ketua Komisi VI DPR RI Faisol Riza dalam Rapat Kerja dengan para Menteri dan Kepala Lembaga yang diselenggarakan di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (22/9).

Politisi Fraksi PKB tersebut mengatakan bahwa persetujuan penyesuaian anggaran tahun 2021 mitra kerjanya ini akan segera disampaikan kepada Badan Anggaran (Banggar) DPR RI untuk kemudian ditetapkan dalam rapat paripurna. Ia juga menyatakan dalam kesimpulan bahwa Komisi VI akan melakukan pengawasan secara seksama.

“Komisi VI DPR RI akan melakukan pengawasan secara seksama dan meminta mitra-mitra kerja untuk memberikan laporan secara berkala atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)

Tahun Anggaran 2021,” imbuh Politisi dapil Jawa Timur II ini.

Diuraikan lebih lanjut oleh Faisol, nantinya Kementerian BUMN akan diberikan anggaran sebesar Rp 244,82 miliar yang akan difokuskan dalam program dukungan manajemen, dan program pengembangan dan pengawasan BUMN Rp 68,5 miliar.

Sementara Kementerian Perindustrian akan mendapat anggaran sebesar Rp 3,18 triliun untuk dialokasikan dalam empat program. “Pertama, program dukungan manajemen sebesar Rp 1,44 triliun. Lalu ada program nilai tambah dan daya saing industri sebesar Rp 663,3 miliar. Selanjutnya program riset dan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi sebesar Rp 112,36 miliar. Yang terakhir program pendidikan dan pelatihan vokasi yaitu Rp 962 miliar,” ujarnya.

Kemudian Kementerian Koperasi dan UKM akan mendapat anggaran sebesar Rp 978,2 miliar yang akan dialokasikan untuk program dukungan manajemen sebesar Rp 352,3 miliar. Untuk program kewirausahaan, UMKM,

dan koperasi sebesar Rp 625,9 miliar.

Sementara Kemendag akan diberikan anggaran sebesar Rp 3,02 triliun yang akan diproyeksikan ke dalam empat program. “Program dukungan manajemen sebesar Rp 1,40 triliun, program perdagangan dalam negeri Rp 973 miliar, program perdagangan luar negeri sebesar Rp 643 miliar, dan program riset dan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi sebesar Rp 10,17 miliar,” lanjut Faisol.

Terakhir Komisi VI DPR RI juga menyetujui penambahan anggaran untuk BKPM yang semula Rp 589,5 miliar mendapat penambahan Rp 500 miliar sehingga menjadi Rp 1,08 triliun. Anggaran tersebut akan dialokasikan pada dua program. “Program dukungan manajemen Rp 317,2 miliar dan program penanaman modal sebesar Rp 772,2 miliar,” tambahnya.

Nantinya Komisi VI DPR RI juga menyetujui untuk memperjuangkan penambahan pagu anggaran pada APBN perubahan TA 2021 atau APBN TA 2022 kepada kelima mitranya tersebut. ■ er/es

# Komisi VII Pantau Pembangunan PLTU Cirebon Power

**T**im Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI memastikan dan memantau perkembangan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Unit II PT. Cirebon Electric Power yang sedang berjalan. Dalam kunjungan ke Cirebon itu, didapati progres pembangunan PLTU sudah mencapai 85 persen dari target yang ditentukan.

“Tentunya kami ingin melihat perkembangan dan juga pengembangannya, serta ketersediaan energi listrik di Cirebon. Yang kedua permasalahan dampak lingkungan hidup terhadap daerah sekitarnya agar bisa diminimalisir,” kata Wakil

Ketua Komisi VII DPR RI Ramson Siagian di sela-sela memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR RI ke Cirebon, Jawa Barat, Jumat (18/9).

Poin ketiga, lanjut Ramson, Komisi VII DPR RI mendesak PLTU Cirebon Power berupaya menemukan teknologi baru untuk mengurangi dampak lingkungan hidup di sekitarnya. “Dan yang keempat yang paling penting adalah mengedepankan kepentingan masyarakat di sekitarnya. Saya dengar ada hal terkait masalah pemasangan tower di daerah tertentu, agar dengan segera bisa diselesaikan secara bersama-sama,” tambah Ramson.

Politisi Partai Gerindra itu mengatakan, Indonesia masih

menggunakan 56 persen energi primer yang berasal dari batu bara, karena memiliki *cost* terendah per-kwh-nya. Sehingga pembangunan-pembangunan PLTU 35.000 Megawatt masih berlanjut dalam program Pemerintah. “Oleh karenanya pembangunan tersebut perlu diawasi langsung Komisi VII DPR RI dari segi perkembangannya,” tegas Ramson.

Selain itu, dalam kesempatan tersebut beberapa Anggota Tim Kunspek Komisi VII DPR RI juga mengapresiasi PLTU Unit II Cirebon yang telah memperkerjakan 5000 pekerja, yang mana 3500 orang berasal dari daerah sekitarnya. Hal ini sangat membantu menaikkan perekonomian masyarakat di Cirebon. ■ cas/sf



Tim Kunspek Komisi VII DPR RI berfoto di depan PLTU Cirebon Power, Jawa Barat. Foto: Cas/MAN

# Museum Geologi Bandung Jadi Sarana Pendidikan Sejarah

**M**useum Geologi Bandung menjadi salah satu museum yang paling tinggi pengunjungnya di Indonesia, yakni rata-rata satu juta pengunjung per tahunnya. Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno melihat, museum ini menjadi sarana pendidikan yang sangat baik tidak hanya untuk anak-anak, tetapi juga untuk mahasiswa dan pelajar, serta bagi pihak-pihak yang masih punya keinginan untuk belajar.

“Kita juga bisa mengetahui betapa kaya sejarahnya Indonesia dan juga di sini kita bisa mengetahui betapa kompleksnya kita untuk menemukan rangkaian sejarah kita, mulai dari sejarah manusia, sejarah pembentukan batu dan lain-lain,” ungkap Eddy saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI meninjau Museum Geologi Bandung, di Kota Bandung, Jawa Barat, Jumat (18/9).

Lebih lanjut, Eddy menyampaikan bahwa kehadiran museum tersebut sangat penting, agar setiap pengunjungnya mengetahui runtutan sejarah, misalnya guna pengembangan *geothermal*, pengeboran minyak, penemuan batu bara dan lain-lain. “(Museum) Ini saya kira memberikan masukan dan memberikan perluasan pandangan bagi kita semua dan sangat bermanfaat bagi seluruh anggota Komisi VII DPR RI,” tegas Eddy.

“Saya kira selama ini temuan-temuan geologi sudah tercatat dengan baik, terkelola dengan baik dan saya memberikan apresiasi kepada Kepala Museum Geologi yang telah mengorganisir dan mengelola museumnya dengan baik. Kita berharap setelah pandemi nanti, museum ini kembali ramai dikunjungi,” harap politisi Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) ini.



Tim Kunspek Komisi VII DPR RI meninjau Museum Geologi Bandung, Jawa Barat. Foto: Singgih/MAN

Sebelumnya Eddy menjelaskan, kunjungan Komisi VII DPR RI ke Museum Geologi Bandung ini dalam rangka fungsi pengawasan, khususnya guna memperoleh informasi tentang koleksi, program kegiatan, dan permasalahan-permasalahan yang dihadapi Museum Geologi Bandung dalam pelaksanaan fungsinya.

“Kita datang ke sini, untuk melihat langsung ke apa saja yang ada di Museum Geologi dalam rangka untuk menambah informasi terkait hal-hal yang menyangkut geologi di Indonesia,” jelas Eddy kepada *Parlementaria*.

Sebagaimana diketahui, berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI Nomor 12 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Museum Geologi, Museum Geologi

merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Badan Geologi Kementerian ESDM RI yang memiliki tugas melaksanakan pengelolaan, penelitian, pengembangan, konservasi, peragaan, dan penyebarluasan informasi koleksi geologi.

“Dengan adanya kondisi geografis dan geologis wilayah Indonesia yang berada dalam jalur cincin api pasifik (*Pacific Ring of Fire*) dan terletak diantara 3 lempeng aktif yang berinteraksi, yaitu Lempeng Eurasia, Lempeng Pasifik, dan Lempeng Indo-Australia, maka peran Badan Geologi Kementerian ESDM RI menjadi sangat vital dalam pengelolaan sumber daya geologi dan mitigasi kebencanaan di Indonesia,” tutur Eddy menutup pernyataannya. ■ skr/sf



# Pertamina Beda Interpretasi Memahami Permen ESDM 42/2018

**K**omisi VII DPR RI menerima aspirasi terkait Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 42 Tahun 2018 tentang Prioritas Pemanfaatan Minyak Bumi Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dalam Negeri. Dimana, pada Pasal 2 aturan ini dinyatakan, PT Pertamina (Persero) dan Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Pengolahan Minyak Bumi wajib mengutamakan pasokan minyak bumi yang berasal dari dalam negeri.

Saat memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI dengan Direksi PT. Pertamina Refinery Unit (RU) IV Cilacap beserta jajarannya di Komplek Patra Lomanis Residence PT. Pertamina RU IV Cilacap Jawa Tengah, Jumat (18/9), Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto mengatakan terdapat kesalahan interpretasi dalam memahami Permen ESDM Nomor 42 Tahun 2018 itu. Pertemuan ini juga dihadiri perwakilan Kementerian ESDM, Pemerintah Daerah Jawa Tengah dan *stakeholder* lainnya.

“Ada kesalahan interpretasi dalam memahami Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 42 Tahun 2018 mengenai kewajiban membeli dan mengolah *crude oil* (minyak bumi) dalam negeri oleh Pertamina. Ternyata dalam Permen itu tidak diwajibkan, tapi bisa dinegosiasikan (fleksibel). Namun ada pula klausul-klausul lainnya yang menjadikan seolah-olah Pertamina terpaksa harus membeli meskipun dengan harga tinggi,” papar Sugeng.

Politisi Partai NasDem ini menambahkan bahwa aspirasi ini akan dibahas di rapat kerja Komisi VII DPR RI dengan kementerian terkait untuk memperoleh solusi yang terbaik dan tepat. “Kami kebetulan ada Panja Migas yang nantinya akan membawa persoalan ini dalam rapat kerja dengan Menteri ESDM dan rapat dengar pendapat dengan Pertamina

yang intinya bagaimana negara tetap memperoleh pemasukan dari *crude oil*. Namun Pertamina juga tetap bisa untung dan rakyat terpenuhi kebutuhan BBM dengan harga terjangkau dan mudah mendapatkannya,” imbuhnya.

Sugeng juga mendorong komitmen Pertamina pada energi yang bersih dan berkelanjutan. Di sinilah (kilang minyak Cilacap) diproduksi BBM dengan *Research Octane Number* (RON) tinggi. Perlahan RON rendah akan dikurangi, mengingat hanya tinggal 7 negara saja yang masih memakai BBM dengan RON rendah yaitu di bawah 91. “Kita sudah masuk di RON 92 ke atas sehingga lingkungan hidup kita menjadi lebih bersih bagi anak cucu kita kelak,” ungkap legislator dapil Jateng VIII itu.

Sementara itu, Direktur Operasional

RU IV Cilacap Djoko Priyono mengakui, pihaknya terkendala Permen ESDM No. 42 Tahun 2018 ketika harga *crude oil* dunia anjlok, sementara Pertamina tetap harus membeli *crude oil* dalam negeri yang harganya lebih mahal.

Ketika pandemi Covid-19 melanda dunia maka deviasi *crude oil* makin tinggi sulit terelakkan. Selisih harga antara *crude oil* dengan produk makin tipis, menyebabkan kerugian sulit dihindari. “Persoalan lain yang turut menyumbang kerugian Pertamina antara lain biaya angkut kapal ke 30 titik pengambilan *crude oil* yang membutuhkan biaya cukup tinggi, peningkatan *inventory change* (penyesuaian jumlah persediaan), serta peningkatan biaya akibat depresiasi rupiah,” tutup Djoko. ■ oji/es



Foto bersama Tim Kunspek Komisi VII DPR RI dengan Direksi PT. Pertamina Refinery Unit (RU) IV Cilacap. Foto: Oji/Man

# Jateng Terdepan dalam Penyaluran Subsidi KUR

**T**erbbitnya Peraturan Menteri Koordinator Perekonomian (Permenko) Nomor 6 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Permenko Nomor 8 Tahun 2020, telah memberikan perlakuan khusus bagi debitur Kredit Usaha Rakyat (KUR). Perlakuan khusus tersebut antara lain berupa pemberian tambahan subsidi bunga sebesar 6 persen untuk 3 bulan pertama dan 3 persen untuk di 3 bulan kedua sejak April 2020.

“Sampai dengan 14 September 2020, di Jawa Tengah telah disalurkan tambahan subsidi KUR senilai Rp 242.827.828.136 kepada 1.035.317 debitur. Penyaluran subsidi bunga KUR di Jawa Tengah ini menduduki urutan pertama secara nasional,” ucap Ketua Komisi XI DPR

RI Dito Ganinduto saat konferensi pers usai pertemuan Tim Kunspek Komisi XI DPR RI dengan Komisioner OJK, Kemenkeu, BI dan Himbara di Semarang, Jawa Tengah, Jumat (18/9).

Ia memaparkan, hingga 31 Agustus 2020, Pemerintah telah menyalurkan KUR sebesar Rp 89,680 triliun yang telah menjangkau 2.571.179 debitur di seluruh Indonesia. Di Jawa Tengah sendiri telah tersalurkan sebesar Rp 16.505,43 miliar.

Dito berharap KUR yang tetap tersalurkan atau terserap debitur ini menjadi pertanda bahwa geliat ekonomi terutama Usaha Kecil, Mikro dan Menengah (UMKM) di masa pandemi ini tetap bertahan dan pulih kedepannya.

“Saya berharap, ke depan agar optimalisasi penyaluran KUR dan ditambah program PEN melalui

subsidi bunga KUR kepada UMKM di provinsi Jawa Tengah, dapat memperkuat ekonomi daerah untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional,” harap wakil rakyat dapil Jawa Tengah VIII itu.

Di tengah masa penanganan pandemi Covid-19, dengan berbagai kebijakan yang diambil pemerintah, Dito menekankan agar Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) sebagai *Agent of development* dapat berperan dalam mempertemukan daya beli masyarakat dan rantai pasokan. Sehingga tercipta kesempatan kerja dan modal berikutnya, dengan begitu perekonomian dapat pulih secara berkesinambungan.

Dari data yang disampaikan Dito, per 31 Juli 2020, diketahui Himbara telah menyalurkan KUR sebesar Rp 154,4 triliun dengan jumlah debitur mencapai 2,6 juta. Jumlah tersebut baru mencapai 81 persen dari target penyaluran KUR yaitu sebesar Rp 190 triliun. “BRI telah menyalurkan sebesar Rp 107,19 triliun untuk 2,38 juta nasabah, Bank Mandiri telah menyalurkan KUR sebesar Rp 32,62 triliun, BNI telah menyalurkan Rp 14,4 triliun bagi 117 ribu nasabah dan BTN telah menyalurkan Rp 140 miliar bagi 201 ribu nasabah,” terang Dito.

Politisi Partai Golkar ini berharap sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sangat diperlukan agar program-program di bidang kesehatan, jaring pengaman sosial dan ekonomi dapat tersalurkan dengan cepat dan tepat sasaran. Termasuk implementasi program KUR yang bertujuan untuk membangkitkan kembali aktivitas UMKM secara berkelanjutan dan momentum perbaikan perekonomian tercipta. ■es



Tim Kunspek Komisi XI DPR RI bertukar cenderamata dengan mitra kerja di Semarang, Jawa Tengah. Foto: Erman/MAN



Tim Kunspek Komisi XI DPR RI memperlihatkan benih lobster yang disita Bea dan Cukai Tipe C Bandara Soekarno-Hatta. Foto: Angga/MAN

# Penggagalan Penyelundupan Benih Lobster Diapresiasi

**W**akil Ketua Komisi XI DPR RI Eriko Sotarduga memberikan apresiasi atas kinerja Bea dan Cukai yang telah menjalankan tugas dan semua fungsinya dengan baik. Dengan pengawasan yang dilakukan di tengah pandemi Covid-19, Bea dan Cukai Tipe C Bandara Soekarno-Hatta telah berhasil menggagalkan penyelundupan 315 *colly* benih lobster dan 2.092 gram narkotika jenis sabu-sabu.

Hal tersebut disampaikan Eriko dalam Konferensi Pers antara Tim Komisi XI DPR RI bersama Bea dan Cukai Tipe C Bandara Soekarno-Hatta beserta Tim Gabungan dan Bareskrim Polri di Gedung Kantor Pelayanan Umum (KPU) Bea Cukai Bandara Soetta, Tangerang, Banten, Jumat (18/9). Eriko menilai di tengah pandemi seperti ini kinerja pengawasan memang harus diperketat.

“Pandemi tidak boleh membuat Bea Cukai menjadi lengah, tetapi tetap mengencangkan ikat pinggang untuk menekan pelanggaran dan kegiatan menyimpang yang dapat mempengaruhi kehidupan bangsa serta mengakibatkan kebocoran penerimaan negara. Kami mengapresiasi kinerja Tim Gabungan beserta Bareskrim Polri dalam komitmen memberantas penyelundupan,” terang politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu.

Eriko pun meminta agar ke depan Bea dan Cukai turut menggandeng peran aktif masyarakat dalam upaya pencegahan. “Upaya dalam pemberantasan ini tidak akan bisa maksimal tanpa peran aktif masyarakat. Komisi XI DPR RI akan senantiasa mendukung kinerja Bea Cukai dalam rangka mencapai penerimaan negara dan pengawasan dari masuknya barang ilegal,” tutur Eriko.

Konferensi Pers tersebut dihadiri oleh Anggota Komisi XI DPR RI lainnya, dalam rangka Kunjungan Kerja Spesifik terkait fungsi pengawasan Bea dan Cukai, di antaranya Andreas Eddy Susetyo dan Indah Kurnia dari Fraksi PDI Perjuangan, Kamrussamad (F-Gerindra), Misbakhun (F-Golkar), Hasbi Anshory (F-Nasdem), Linda Megawati dan Siti Mufattahah dari Fraksi Partai Demokrat, Achmad Hafisz Tohir (F-PAN), serta Junaidi Auly dan Hidayatullah dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F- PKS).

Komisi XI DPR RI mendukung penuh upaya Bea Cukai dalam melakukan pengawasan lalu lintas impor dan ekspor guna mencegah penyalahgunaan wewenang. Bea Cukai membuktikan dengan tetap berkomitmen untuk memperketat pengawasan dengan menguatkan sinergi seluruh komunitas di Bandara Soekarno-Hatta. ■ *er/sf*

# Komisi XI Pastikan Pengelolaan Uang Rupiah oleh Peruri

**G**una memastikan pengelolaan uang rupiah sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang, Komisi XI DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Perum Peruri). Dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Komisi XI DPR Achmad Hatari, kunjungan tersebut bermaksud untuk memastikan sejauh mana tugas pengelolaan uang rupiah yang diemban Bank Indonesia dengan menggandeng Peruri, dapat berjalan dengan baik.

“Sebagaimana kita ketahui, Bank Indonesia memiliki misi di bidang pengelolaan uang rupiah yaitu memenuhi kebutuhan uang rupiah di masyarakat dalam jumlah nominal yang cukup, jenis pecahan yang sesuai, tepat waktu dan dalam kondisi layak edar. Sesuai amanat UU Mata Uang, pencetakan uang rupiah dilaksanakan di dalam negeri dengan menunjuk BUMN sebagai pelaksana pencetakan uang rupiah. Saat ini Perum Peruri merupakan satu-satunya BUMN yang bergerak dalam bidang pencetakan uang rupiah,” kata Hatari dalam pertemuan yang berlangsung di Perum Peruri, Karang Mulya, Karawang, Jawa Barat, Jumat (19/9).

Turut hadir dalam kunjungan tersebut, Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan menambahkan bahwa selain mencetak uang rupiah kertas dan logam, Perum Peruri juga memproduksi sejumlah alat kelengkapan pajak seperti meterai, surat berharga untuk sertifikat dan pita cukai rokok. Sesuai aturan Mata Uang, Perum Peruri menjadi satu-satunya perusahaan pelat merah yang boleh bergerak dalam bidang pencetakan uang rupiah, bahkan satu-satunya perusahaan yang ditunjuk untuk



Tim Kunspek Komisi XI DPR RI berkunjung ke Peruri, di Karang Mulya, Karawang, Jawa Barat. Foto: ALFI/MAN

mencetak uang negara.

Hergun, sapaan akrab Heri Gunawan, mencontohkan perusahaan swasta seperti PT. Pura Barutama di Kudus, Jawa Tengah memiliki potensi untuk menjadi pihak ketiga lainnya. “Kita tanya Peruri sudah kerja sama dengan siapa saja, karena tidak tertutup kemungkinan Peruri menurunkan lagi kepada anak perusahaannya, PT. Peruri Digital Security (PDS). Tentu ini menjadi catatan yang perlu diketahui, terlebih era digital seperti sekarang ini kemampuan Peruri dalam menghasilkan surat-suat berharga negara, termasuk rupiah kertas dan logam perlu diketahui,” imbuh politisi Partai Gerindra itu.

Di tengah pandemi yang masih berlangsung sekarang ini, Hergun melihat ketersediaan rupiah masih dalam kategori

wajar, namun harapannya masih bisa lebih *secure* lagi di masa mendatang.

Untuk itu, masih kata Hergun, pihaknya sempat bertanya kepada Direktur Utama Perum Peruri Dwina Septiani Wijaya, dan juga kepada Deputi Gubernur Bank Indonesia Rosmaya Hadi, terkait adanya pesanan untuk mencetak uang lebih dikala pandemi.

“Perlu tanyakan Peruri adakah wacana atau pesanan baru dari Bank Indonesia untuk mencetak uang lebih, kalau kita lihat neraca BI dengan adanya *burden sharing* dengan Pemerintah tentu harus ditutupi. Terlebih melalui Perppu kemarin, BI sudah bisa *main* di pasar sekunder dan membeli SBN, *nah* membeli ini kan apakah dari neraca BI atau uang yang dicetak yang belum masuk neraca sebelum disetujui melalui rapat Dewan Gubernur,” jelas Hergun. ■ *alw/sf*

# Pandemi Covid-19, Momentum Menuju Ekonomi Hijau

**K**etua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon menilai pandemi Covid-19 merupakan momentum untuk beralih ke ekonomi yang ramah lingkungan (green growth) guna mendukung tercapainya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya yang terkait dengan perubahan iklim.

Demikian disampaikan Fadli Zon dalam *Focus Group Discussion* (FGD) dengan tema *Green Growth Economy* yang dilakukan bersama mitra dan organisasi internasional seperti *Global Green Growth Institute* (GGGI) dan juga *Organization for Economic Co-Operation and Development* (OECD) di Bali, Rabu (23/9).

“Pandemi Covid-19 memang tidak terduga, yang menyebabkan sebagian besar negara menerapkan pembatasan dan karantina ketat. Namun, akibat karantina itu, kita sempat menikmati udara bersih dan iklim yang hijau beberapa bulan di awal tahun. Jadi,

pandemi juga merupakan momentum untuk memulai secara serius upaya menghijaukan kembali bumi kita dengan tetap menjaga pertumbuhan ekonomi,” kata Fadli.

FGD diikuti oleh Anggota BKSAP DPR RI khususnya Anggota Panja Organisasi Internasional yang juga berasal dari berbagai komisi. Turut hadir Pimpinan BKSAP DPR RI Putu Supadma Rudana dan Mardani Ali Sera.

FGD yang terselenggara atas kerja sama BKSAP dengan *Westminster Foundation for Democracy* (WFD), *Institute for Peace and Democracy* (IPD) serta Universitas Warmadewa ini menitikberatkan pada dua upaya besar terkait peran dan kontribusi Organisasi Internasional ke Indonesia untuk memperkuat keterkaitan antara masyarakat dengan kebijakan yang dihasilkan untuk menuju pertumbuhan hijau.

Mendukung hal itu, menurut Fadli, Indonesia telah berkomitmen untuk pengurangan emisi karbon. Komitmen

Indonesia terhadap perubahan iklim dibuktikan dengan pendaftaran *Nationally Determined Contribution* (NDC) ke komunitas internasional sebagai pelaksanaan *Paris Agreement*.

“Kita berjanji menurunkan emisi karbon 29 persen dalam situasi biasa dan 41 persen dengan dukungan internasional pada 2030. Sekarang, kita lihat mendalam bagaimana kontribusi Organisasi Internasional juga dalam isu ini. Bagaimana mereka berperan bagi Indonesia dalam menyeimbangkan kebijakan hijau dan pertumbuhan ekonominya,” jelas Fadli.

Fadli Zon juga menyinggung bagaimana kemudian pandemi mengubah struktur APBN. Sehingga DPR perlu mengukur sejauh mana fiskal stimulus berpihak pada upaya pengurangan karbon yang sejalan dengan NDC. “Apakah kemudian ada stimulus hijau bagi ekonomi? Apakah ada kebijakan lainnya yang mendukung pertumbuhan hijau dalam proses pandemi?,” ujarnya.

Politisi Partai Gerindra ini juga berharap agar kebijakan yang diambil bersifat inklusif, jelas, bervisi ke depan, berbasis sains, dan berpihak pada lingkungan. Mengingat, kebijakan iklim akan sangat berdampak pada masyarakat. Untuk itu perlu upaya menghubungkan proses pembuatan kebijakan dengan masyarakat. Karena itu, BKSAP menilai pentingnya partisipasi publik sebagai bagian dari perwujudan komitmen internasional, termasuk dalam mendukung pertumbuhan ekonomi hijau Indonesia.

BKSAP juga ingin memperkuat koneksi publik dengan pengambil kebijakan, sekaligus memperkuat sistem demokrasi. Masyarakat pun ikut berkontribusi memajukan bangsa dan mensejahterakan masyarakat. ■ ann/es



Pimpinan BKSAP DPR RI dalam FGD "Green Growth Economy" bersama Global Green Growth Institute (GGGI) dan juga Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD) di Bali. Foto: Abu/MAN

# BAKN DPR Serap Aspirasi Petani dan Sopir Purwakarta

**W**akil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI

Achmad Syaikhmu menerima beberapa aspirasi masyarakat Kabupaten Purwakarta terkait subsidi bidang energi yang diberikan Pemerintah. Salah satu aspirasi yang diterima BAKN adalah terkait kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium.

Hal ini disampaikan Syaikhmu kepada *Parlementaria* usai pertemuan BKAN DPR RI dengan Sekretaris Daerah Purwakarta beserta jajarannya, perwakilan petani dan sopir angkutan umum yang tergabung dalam Organda di Purwakarta, Jawa Barat, Rabu (23/9).

“Salah satunya adanya aspirasi masyarakat termasuk para sopir angkutan di Purwakarta yang mengeluhkan kelangkaan premium. Karena satu Kabupaten Purwakarta dengan 17 kecamatan ini hanya ada

satu SPBU yang menyediakan premium, dan itu untuk melayani 2500 kendaraan jenis ELF dan 1500 angkot. Ini tentu sangat kurang, sehingga antrian di SPBU itu sangat panjang,” ujar Syaikhmu.

Ia menyampaikan, bukan tidak mungkin minimnya SPBU yang menyediakan Premium di Purwakarta juga menyebabkan munculnya banyak pompa-pompa bensin mini di luar Pertamina. Oleh karena itu, ia berharap ke depan perlu sebuah kebijakan agar ada penambahan SPBU dan kuota premium yang notabene merupakan BBM bersubsidi.

Dengan adanya penambahan SPBU, angkutan-angkutan pedesaan maupun angkutan-angkutan yang memang layak menerima ini betul-betul bisa mendapatkan BBM jenis Premium. Dengan kata lain, perlu pemerataan distribusi premium ke daerah-daerah, sehingga BBM bersubsidi ini benar-benar diterima oleh masyarakat yang

memang berhak menerimanya.

Aspirasi lainnya datang dari petani Purwakarta. Syaikhmu menyampaikan, para petani berharap adanya perubahan mekanisme pembelian bahan bakar bersubsidi untuk alat mesin pertanian (alsintan) yang lebih simpel dan sederhana. Karena selama ini mereka dibatasi hanya 10 liter per hari. Itu pun sebelumnya harus mendapat surat keterangan dari kepala desa, atau jika ingin dalam jumlah yang banyak harus minta izin terlebih dahulu dari pihak kepolisian.

“Proses tersebut tentu sangat panjang. Mereka (petani Purwakarta) berharap pembelian BBM bersubsidi untuk alsintan cukup dengan menggunakan kartu tani yang selama ini sudah mereka terima. Masukan-masukan ini tentu akan kami sampaikan ke Pemerintah dan tentu ke pihak Pertamina ke depan,” pungkas politisi Fraksi PKS ini. ■ ayu/es



Foto bersama Tim Kunker BAKN DPR RI dengan jajaran Pemerintah Daerah Purwakarta, serta perwakilan petani dan sopir, di Purwakarta, Jawa Barat. Foto: Ayu/MAN



Tim Kunker BURT DPR RI dipimpin Ketua BURT DPR RI Agung Budi Santoso meninjau fasilitas RS EMC Sentul, Jawa Barat. Foto: Sofyan/MAN

# RS EMC Sentul Layak Tangani Peserta Jamkestama

**B**adan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI menilai RS EMC Sentul, Bogor, layak menangani peserta Jaminan Kesehatan Utama (Jamkestama), khususnya dalam hal ini Anggota DPR RI beserta keluarganya. Penilaian ini diungkapkan Ketua BURT DPR RI Agung Budi Santoso usai mendapat informasi dari Direksi RS EMC Sentul, dan meninjau sejumlah fasilitasnya.

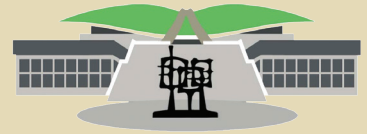
“Rumah sakit (EMC Sentul) cukup menjadi representatif untuk melayani Anggota DPR dan keluarganya. Itu yang kita lihat, dan kita lihat cukup bagus, sudah cukup baik. Tentunya ini sudah menjadi pilihan yang tepat bagi Jasindo, untuk Anggota DPR yang tinggal di wilayah Bogor dan sekitarnya bisa memanfaatkan rumah sakit ini,” kata Agung di sela-sela memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja BURT DPR RI dan meninjau RS EMC Sentul di Bogor, Jawa Barat, Kamis (24/9).

Politisi Partai Demokrat ini menambahkan, kendati RS ini masih kategori kelas B, namun dari segi fasilitas sangat cukup dan layak untuk melayani Anggota DPR RI dan keluarganya. Walaupun demikian, pihaknya tetap mendorong Direksi RS EMC Sentul untuk terus meningkatkan performa dan fasilitas RS. Di sisi lain, pada kesempatan itu Tim Kunker juga menanyakan prosedur penanganan Covid-19, termasuk upaya pencegahannya.

“Bagi saya, bila kita ke rumah sakit, saya selalu menanyakan bagaimana kita bisa mencegah Covid-19, tentunya saya ingin selalu minta trik-trik atau cara-cara bagaimana kita mencegah atau tidak tertular oleh Covid-19. Sudah diterangkan baik sekali, yang penting tetap gunakan masker, sering cuci tangan dan jaga jarak (social distancing). Kita juga tidak boleh lama-lama diam atau di suatu ruangan tertutup,” imbuh legislator dapil Jawa Barat I itu.

Anggota Komisi II DPR RI ini menambahkan, berbagai upaya itu perlu dilakukan untuk mencegah penularan Covid-19. “Tentunya (berbagai upaya) itu yang akan kita *support* juga ke konstituen kita, karena semua anggota punya konstituen, juga tentunya keluarga kita. Sehingga mereka bisa mendapatkan protokol Corona dengan lebih baik, karena selama vaksin itu belum ditemukan, saya bilang masih cukup berbahaya penyakitnya,” tandas Agung.

Pada kesempatan tersebut, Direktur RS EMC Sentul G.A Kusmiati menjelaskan sejumlah fasilitas yang dimiliki RS EMC Sentul. Ia menuturkan, RS EMC telah berdiri dari tahun 2013, dengan tingkatan kelas B dan memiliki 150 bed. RS ini juga memiliki perawatan kelas 3, 2, VIP hingga VVIP. RS juga didukung berbagai fasilitas seperti IGD 24 jam, Poliklinik, ICU, MCU, Endoskopi, Cath Lab, Hemodialisa, hingga Pain Center Management. ■sf



Wakil Ketua DPR RI Korekku Sufmi Dasco Ahmad menerima kunjungan kehormatan Duta Besar Perancis untuk Indonesia Olivier Chambar di Gedung DPR RI, Senayan,, Jakarta, pada Rabu (23/9). Foto: Yoga/MAN



Pimpinan dan Anggota Baleg DPR RI menerima pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi terkait RUU tentang Kejaksaan yang diusulkan oleh Komisi III DPR RI, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (17/9). Foto: Gerald/MAN



Sekjen DPR RI Indra Iskandar menghadiri Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah secara virtual, Selasa (22/9) Dalam Rakernas ini, diketahui Setjen DPR RI mendapat opini WTP ke-12 kalinya dan BMN Award. Foto: Runi/Man

